

### **BAB III**

## **PEMIKIRAN *PLURALISME* AGAMA KH. ABDURRAHMAN WAHID DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

### **A. Biografi KH. Abdurrahman Wahid**

Kisah kehidupan KH. Abdurrahman Wahid berkisar di lingkungan pesantren. Karena sebagian besar waktu beliau dihabiskan untuk belajar dan mengajar di pesantren. Ia bahkan mengatur “kegiatan-kegiatan politik” dari pesantren. Untuk mengetahui sosok KH. Abdurrahman Wahid secara komprehensif, dibawah ini akan dijelaskan riwayat hidup, latar belakang pendidikan pemikiran dan amal perjuangannya.

#### **1. Latar Belakang Keluarga**

Abdurrahman Addakhil, demikian nama lengkapnya. Secara leksikal, "Addakhil" berarti "Sang Penakluk", sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya, dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Belakangan kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", KH. Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti "abang" atau "mas".

KH. Abdurrahman wahid adalah putra pertama dari enam bersaudara<sup>1</sup> yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik KH. Abdurrahman Wahid adalah keturunan dari keluarga terhormat atau lebih dikenal dengan sebutan "darah biru".<sup>2</sup>Ayah KH. Abdurrahman Wahid, KH. Wahid

---

<sup>1</sup> Enam bersaudara itu adalah Abdurrahman Wahid (1940), Aisyah (1941), Salahuddin (1942), Ummar (1944), Chodijah (1948), Hasyim (1953)

<sup>2</sup> Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 4

Hasyim, Di lahirkan di Tebu Ireng, Jombang pada bulan Juni 1914. Ia adalah putra pertama dan anak kelima dari sepuluh bersaudara dan Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang.<sup>3</sup>

Bahwa KH. [Wahid Hasyim](#) adalah orang yang mempunyai rasa cinta terhadap masyarakatnya, namun demikian ia sering merasa putus asa melihat cupetnya pikiran yang mengekang masyarakatnya ini. KH. Wahid Hasyim yang pernah punya jabatan sebagai menteri Agama, ia merasa terganggu oleh sikap tergantung dan manja oleh sikap kementriannya. Namun demikian, KH. Wahid Hasyim selalu cenderung tidak mau terganggu oleh apa saja yang tidak dapat dikembalikannya. Pada tahun 1952, setelah bertahan selama lima kabinet, KH. Wahid Hasyim kehilangan jabatan ini dalam salah satu pergantian menteri yang sering terjadi dalam periodenya ini. Sebagai menteri, Ia akhirnya bertanggungjawab untuk mengorganisasi perjalanan Naik Haji di Indonesia sehingga beberapa ribu calon jamaah Haji tidak dapat pergi ke Makkah. Kemunduran ini menimbulkan mosi tidak percaya DPR terhadap KH. Wahid Hasyim dan pada umumnya tak ada gunanya untuk mencoba meningkatkan reputasinya. Maka KH. Wahid Hasyim pun dengan senang hati melepaskan jabatannya.

Pada hari sabtu tanggal 18 April 1953, KH. Abdurrahman Wahid bepergian menemani Ayahnya untuk suatu pertemuan NU di Sumedang, yang dapat ditempuh dengan mobil dalam waktu beberapa jam saja dan terletak disebelah tenggara Jakarta. Dijalan menuju kota Bandung yang berliku-liku melalui pegunungan berapi dan menjadi punggung pulau Jawa. Ketika perjalanan berada antara Cimahi dan Bandung, KH. Wahid Hasyim dan KH. Abdurrahman Wahid bersama dengan Argo Sutjipto, seorang penerbit yang merupakan sahabatnya, terjadi kecelakaan sekitar pukul 01.00 siang tetapi mobil ambulan dari

---

<sup>3</sup> M. Hamid, *Gus Gerr*, (Pustaka Marwa: Yogyakarta, 2010), hlm. 14

Bandung baru tiba ditempat kejadian sekitar pukul 04.00 sore. Pada pukul 10.30 pagi keesokan harinya, KH. Wahid Hasyim tak lagi dapat bertahan dan meninggal dunia. Beberapa jam kemudian Argo juga meninggal dunia. KH. Wahid Hasyim, yang merupakan harapan banyak orang di Indonesia, telah menghembuskan nafas terakhir, ia berusia 38 tahun. KH. Abdurrahman Wahid baru berusia 12 tahun.<sup>4</sup>

Kakek KH. Abdurrahman Wahid dari pihak ayahnya adalah KH. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama' (NU) dan pendiri pesantren Tebuireng Jombang.<sup>5</sup> KH. Hasyim Asy'ari dilahirkan di Jombang pada bulan Februari 1871 dan wafat di Jombang pada Juli 1947. Ia adalah salah seorang yang mendirikan NU pada tahun 1926 dan sangat dihormati sebagai seorang pemimpin Islam dalam masyarakat pedesaan yang tradisional. Ia juga dikenal sebagai seorang guru yang banyak memberi inspirasi serta seorang terpelajar. Namun, Ia juga seorang nasionalis yang teguh pendirian. Banyak dari teman-temannya merupakan tokoh-tokoh terkemuka gerakan nasionalis pada periode sebelum perang.

Kemudian kakek KH. Abdurrahman Wahid dari pihak Ibu, Kiai Bisri Syansuri. Kiai Bisri Syansuri dilahirkan pada bulan september 1816 di daerah pesisir sebelah utara Jawa Tengah, sebuah daerah yang mempunyai banyak pesantren. Bersama dengan KH. Hasyim Asy'ari, Ia dianggap sebagai salah seorang tokoh kunci bagi didirikannya NU. Pada tahun 1917, ia memperkenalkan pada dunia pesantren, kelas pertama bagi santri puteri di Pesantrennya yang baru di dirikan di Desa Denanyar, yang terletak diluar Jombang. KH. Bisri Syansuri mengambil sebidang tanah yang luas, dan benar-benar tandus. Setelah beberapa lama tanah itu berubah menjadi komunitas yang makmur dalam pengembangan pertanian, pembelajaran, dan keruhanian. KH.

---

<sup>4</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), hlm. 44-45

<sup>5</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 26

Bisri Syansuri telah membuktikan dirinya bukan sekedar seorang ahli fiqh, atau Yurisprudensi Islam, dan seorang administrator pendidikan yang berbakat, melainkan juga seorang ahli pertanian yang cakap. Pesantrennya di Denanyar terkenal oleh karena pendekatan yang teratur dan berdisiplin terhadap keilmuan dan kehidupan bersama.<sup>6</sup>

Dengan demikian, KH. Abdurrahman Wahid merupakan cucu dari ulama' NU, yaitu KH. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama' (NU) dan KH. Bisri Syansuri merupakan tokoh NU, yang pernah menjadi Rais 'aam PBNU, dan sekaligus dua tokoh tersebut sebagai tokoh bangsa Indonesia.

## **2. Latar Belakang Pendidikan**

Pada tahun 1949, ketika *clash* dengan pemerintahan Belanda telah berakhir, ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama pertama, sehingga keluarga KH. Wahid Hasyim pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana baru telah dimasukinya. Tamu-tamu, yang terdiri dari para tokoh-dengan berbagai bidang profesi-yang sebelumnya telah dijumpai di rumah kakeknya, terus berlanjut ketika ayahnya menjadi Menteri agama. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi seorang anak bernama KH. Abdurrahman Wahid. Secara tidak langsung, KH. Abdurrahman Wahid juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumahnya.<sup>7</sup>

Walaupun Ayahnya seorang menteri dan terkenal di kalangan pemerintahan Jakarta, KH. Abdurrahman Wahid tidak pernah bersekolah di sekolah-sekolah elit yang biasanya dimasuki oleh anak-anak pejabat pemerintah. Ayahnya pernah menawarinya untuk masuk ke sekolah elit, tetapi KH. Abdurrahman Wahid lebih menyukai sekolah-sekolah biasa. Katanya, sekolah-sekolah elit membuatnya

---

<sup>6</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 29

<sup>7</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 39

tidak betah. KH. Abdurrahman Wahid memulai pendidikan sekolah dasarnya di sekolah dasar KRIS di Jakarta pusat. Ia mengikuti pelajaran di kelas tiga dan kemudian di kelas empat di sekolah ini tetapi kemudian ia pindah ke sekolah dasar Matraman Perwari, yang terletak dekat dengan rumah keluarga mereka yang baru di Matraman, Jakarta Pusat.

Dalam waktu yang pendek, KH. Abduraahman Wahid tidak terlihat sebagai siswa yang cemerlang. Pada tahun 1954, setahun setelah ia menamatkan sekolah dasar dan mulai sekolah menengah ekonomi pertama (SMEP), ia terpaksa mengulang kelas satu karena gagal dalam ujian. Kegagalan ini jelas disebabkan oleh seringnya Ia menonton pertandingan sepak bola sehingga ia tak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah.<sup>8</sup>

Pada tahun 1954, sementara sang Ibu berjuang sendirian untuk membesarkan enam anak, sedangkan KH. Abdurrahman Wahid sendiri kurang berhasil dalam pelajaran sekolahnya, ia dikirim ke Yogyakarta untuk melanjutkan pelajarannya di SMEP. Ketika di kota ini, ia berdiam di rumah salah seorang teman Ayahnya, Kia Haji Junaidi. Yang menarik adalah bahwa Kiai Junaidi adalah salah seorang sejumlah kecil ulama' yang terlibat dalam gerakan Muhammadiyah pada periode itu. Ia anggota Majelis Tarjih atau Dewan Penasehat Agama Muhammadiyah.

Hal ini mungkin biasa-biasa saja, tetapi saat itu, dan bahkan dalam beberapa dasawarsa kemudian, secara relatif hampir tidak terdapat pertautan antara kaum modernis Muhammadiyah dan kaum tradisional NU. Sebagaimana NU dulu dan sekarang, merupakan organisasi Ulama' yang mewakili Islam tradisional di Indonesia, hampir semua kaum Modernis tergabung dalam Muhammadiyah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 49

<sup>9</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 50

Untuk melengkapi pendidikan KH. Abdurrahman Wahid maka diaturlah agar Ia dapat pergi kepesantren Al-Munawwir di Krapyak tiga kali seminggu. Pesantren ini terletak diluar sedikit Kota Yogyakarta. Disini ia belajar bahasa Arab dengan KH. Ali Maksum. Ketika tamat sekolah menengah ekonomi pertama (SMEP) di Yogyakarta pada tahun 1957, KH. Abdurrahman Wahid mulai mengikuti pelajaran di Pesantren secara penuh. Ia bergabung dengan pesantren di Tegal Rejo Magelang, yang terletak disebelah utara Yogyakarta, ia tinggal disini hingga pertengahan 1959. disini ia belajar pada Kiai Khudhori, yang merupakan salah satu dari pemuka NU. Pada saat yang sama ia juga belajar paro waktu di Pesantren Denanyar di Jombang dibawah bimbingan Kakeknya dari pihak Ibu, KH. Bisri Syansuri.

Pada tahun 1959 ia pindah ke Jombang untuk belajar secara penuh di Pesantren Tambakberas dibawah bimbingan Kiai Wahab Chasbullah. Ia belajar disini hingga tahun 1963 dan selama kurun waktu itu ia selalu berhubungan dengan Kiai Bisri Syansuri secara teratur. Selama tahun pertamanya di Tambakberas, ia mendapat dorongan untuk mulai mengajar. Ia kemudian mengajar di Madrasah modern yang didirikan dalam komplek pesantren dan juga menjadi kepala sekolahnya. Selama masa ini ia tetap berkunjung ke Krapyak secara teratur. Disini ia tinggal di rumah Kiai Ali Maksum. Pada masa inilah sejak akhir tahun 1950-an hingga 1963 KH. Abdurrahman Wahid mengalami konsolidasi dalam studi formalnya tentang Islam dan sastra Arab klasik.<sup>10</sup>

Tahun 1964, KH. Abdurrahman Wahid berangkat ke Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Namun sebagian besar waktunya di Mesir dihabiskan di ruang perpustakaan, terutama *American University Library*, sebuah perpustakaan terlengkap di kota itu. Dari Mesir Ia

---

<sup>10</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID*, hlm. 53

pindah ke Universitas Baghdad mengambil fakultas sastra.<sup>11</sup> Tidak terlalu jelas, apakah KH. Abdurrahman Wahid menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar kesarjanaannya di Baghdad. Karena sebagian orang menganggapnya selesai dan memperoleh gelar LC. Namun sebagian yang lain menyatakan "tidak memperoleh gelar" atau "tidak selesai". Namun yang pasti, usai di Baghdad, KH. Abdurrahman Wahid ingin menguyam dunia pendidikan liberal Eropa.

Pada tahun 1971, Ia menjajaki salah satu di Universitas Eropa untuk melanjutkan pendidikannya disana. Akan tetapi, harapannya tidak kesampaian karena kualifikasi-kualifikasi mahasiswa dari Timur Tengah tidak diakui Universitas-Universitas di Eropa. Selanjutnya, yang memotivasi KH. Abdurrahman Wahid untuk pergi ke MC Gill University Kanada untuk mempelajari kajian-kajian ke Islam secara mendalam. Namun pada akhirnya, Ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah terilhami berita-berita menarik sekitar perkembangan dunia pesantren.

Sekembalinya di Indonesia, Ia kembali ke habitatnya semula yakni dunia pesantren. Dari tahun 1972 hingga 1974, Ia di percaya menjadi dosen disamping Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy'ari Jombang.<sup>12</sup> Kemudian tahun 1974 sampai 1980 oleh pamannya, KH. Yusuf Hasyim, di beri amanat untuk menjadi sekretaris umum Pesantren Tebuireng, Jombang. Selama periode ini Ia secara teratur mulai terlibat dalam kepengurusan NU dengan menjabat Katib awal Syuriah PBNU sejak tahun 1979.

### **3. Latar Belakang Sosial dan Politik**

Dengan latar belakang pendidikan, pergaulan dan perkenalannya dengan dunia keilmuan yang cukup kosmopolit itu, KH. Abdurrahman Wahid mulai muncul ke permukaan percaturan intelektual Indonesia

---

<sup>11</sup> Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 119-120

<sup>12</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 9

dengan pemikiran-pemikiran briliannya pada tahun 1970-an, ketika ia mulai aktif di beberapa lembaga sosial, LSM dan forum-forum diskusi.<sup>13</sup>

Sikap KH. Abdurrahman Wahid itu sempat didengar oleh para aktivis LSM (lembaga swadaya masyarakat) di Jakarta, utamanya yang bergabung di LP3ES (Lembaga Penelitian Penerangan dan Pendidikan Ekonomi dan Sosial). Salah satu yang tanggap terhadap fenomena KH. Abdurrahman Wahid pada saat itu adalah Dawam Raharjo. Oleh sebab itu, kemudian ia berusaha menghadirkan KH. Abdurrahman Wahid di Jakarta dan menjadikannya sebagai salah seorang fungsionaris di LP3ES. Mulai saat itulah KH. Abdurrahman Wahid tinggal di Jakarta dan bekerja di LP3ES dan bergaul luas dengan para aktivis LSM, baik dari Jakarta maupun dari luar negeri.

LP3ES juga menarik bagi KH. Abdurrahman Wahid karena lembaga ini menunjukkan minat yang besar terhadap dunia pesantren dan mencoba untuk menggabungkannya dengan pengembangan masyarakat. Masih di ingat oleh KH. Abdurrahman Wahid betapa Ia merasa terdorong oleh rasa hormat dan pengakuan yang dalam yang di tunjukkan oleh pimpinan lembaga ini terhadap apa yang dapat di sumbangkan pada organisasi ini.

Kepada LP3ES di berikan oleh KH. Abdurrahman Wahid pemahaman mengenai dunia pesantren dan Islam tradisional, dan dari lembaga ini Ia belajar mengenai aspek-aspek praktis dan kritis mengenai pengembangan masyarakat. Kombinasi ini benar-benar cocok baginya. Pada tahun 1977 Ia di dekati dan di tawari jabatan Dekan Fakultas Ushuluddin pada Universitas Hasyim Asy'ari di Jombang. Dengan gembira Ia menerima tawaran ini. Universitas Islam ini diberi nama kakek KH. Abdurrahman Wahid dan di dirikan oleh suatu konsorsium pesantren untuk memberikan pendidikan tingkat Universitas kepada lulusan Pesantren.

---

<sup>13</sup> Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, hlm. 120



Pada tahun 1979 KH. Abdurrahman Wahid mulai banyak terlibat dalam kepemimpinan NU, yaitu di Syuriah NU. Namun kegiatan di dunia pesantren tidak di tinggalkan, dengan mengasuh pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan.

Sebagai konsekuensi kepindahannya di Jakarta dan kiprahnya di dunia LSM sejak akhir tahun 1970-an, seperti sudah di singgung, Ia mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh maupun kelompok dengan latar belakang berbeda-beda, dan terlibat dalam berbagai proyek dan aktivitas sosial. Sejak saat itu juga, Ia banyak mengadakan kontak secara teratur dengan kaum intelektual muda progresif dan pembaharu seperti Nurcholis Madjid dan Djohan Effendy melalui forum akademik maupun lingkaran kelompok studi. Kemudian dari tahun 1980-1990 berkhidmat di MUI (Majelis Ulama' Indonesia). Dan, sementara itu, Ia juga memasuki pergaulan yang lebih luas.

Pada tahun 1982-1985 KH. Abdurrahman Wahid masuk sebagai ketua DKJ (Dewan Kesenian Jakarta), bergaul akrab dengan para pendeta bahkan sampai pada aktivitas semacam pelatihan bulanan kependetaan protestan, menjadi ketua dewan juri Festival Film Nasional di tahun 70-an dan 80-an, banyak mendapat kritik dari kalangan Ulama', baik Ulama' NU maupun yang lainnya.<sup>14</sup>

## **B. Karya-karya KH. Abdurrahman Wahid**

Keistimewaan yang luar biasa dalam diri KH. Abdurrahman Wahid yaitu bahwa beliau seorang pengarang dan ahli pikir Islam yang dalam ilmunya dan mempunyai nafas panjang dalam karya-karyanya. Karya-karya tulis yang ditinggalkannya menunjukkan sebagai seorang pengarang yang sangat produktif.

KH. Abdurrahman Wahid secara kelembagaan tidak pernah mendapatkan ijazah kesarjanaan namun Ia seorang yang cerdas, progresif dan cemerlang ide-idenya. Tetapi Ia telah membuktikan bahwa Ia adalah

---

<sup>14</sup> Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, hlm. 120

seorang yang cerdas lewat idenya yang cemerlang dan kepiaweannya dalam berbahasa dan retorika serta tulisan-tulusannya di berbagai media massa, majalah, esai, dan kegiatan-kegiatan seminar, sarasehan serta buku-buku yang telah diterbitkan antara lain:<sup>15</sup>

1. Bunga Rampai Pesantren (Darma Bhakti, 1979)
2. Muslim di Tengah Pergumulan (Leppenas, 1981)
3. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (Yogyakarta: LKiS, 1997)
4. Tabayyun Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1998)
5. Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: Lkis, 1999)
6. Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur (Erlangga, 1999)
7. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)
8. Membangun Demokrasi (Remaja Rosda Karya, 1999)
9. Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Grasindo, 1999)
10. Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2000)
11. Melawan Melalui Lelucon (Tempo, 2000)
12. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001)
13. Menggerakkan Tradisi (LKiS, 2001)
14. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (LKiS, 2002)
15. Gus Dur Bertutur (Proaksi, 2005)
16. Islamku, Islam Anda, Islam Kita (The Wahid Institute, 2006)
17. Islam Kosmopolitan (The Wahid Institute, 2007)

Dari berbagai tulisannya baik buku, makalah, dan esai-esai Kompas tahun 90-an menunjukkan tingkat intelektualnya. Dengan bahasa yang sederhana dan lancar, bahkan dalam penyampaian lisan pun, KH. Abdurrahman Wahid diakui sangat komunikatif. Sebagaimana dikatakan Greg Barton meskipun KH. Abdurrahman Wahid mengenyam pendidikan, tidak memiliki gelar kesarjanaan Barat, namun berbagai tulisannya menunjukkan Ia seorang intelektual progresif dan jarang sekali dijumpai *foot note* dalam berbagai tulisannya. Hal ini dikarenakan kemampuannya yang luar biasa dalam memahami karya-karya besar tokoh-tokoh dunia (pemikir dunia seperti: Plato, Aristoteles, Karl Max, Lenin, Max Weber, Snouck Hugronje, Racliffe Brown, dan Milinowski). Selanjutnya karya-karya tersebut dieksplorasi secara kritis dan dikolaborasikan dengan

---

<sup>15</sup> Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 126

pemikiran-pemikiran intelektual Islam dalam memunculkan ide-ide pemikirannya.<sup>16</sup>

### C. Penghargaan yang Diperoleh KH. Abdurrahman Wahid

KH. Abdurrahman Wahid merupakan satu-satunya pemimpin NU yang diakui dunia, baik wawasan keilmuannya, kepeduliannya kepada masalah demokrasi dan toleransi. Serta besarnya pengaruh politik yang dimilikinya.

1. Pada tahun 1993, KH. Abdurrahman Wahid menerima penghargaan Ramon Magsay Award, sebuah “Nobel Asia” dari pemerintah Filipina. Penghargaan ini diberikan karena KH. Abdurrahman Wahid dinilai berhasil membangun landasan yang kokoh bagi toleransi umat beragama, pembangun ekonomi yang adil, dan tegaknya demokrasi di Indonesia.
2. Pada akhir tahun 1994, KH. Abdurrahman Wahid juga terpilih sebagai salah satu seorang presiden WCRP (*World Council for Religion and Peace* atau Dewan Dunia untuk Agama dan Perdamaian).
3. Pada tahun 1996 dan 1997, majalah *Asiaweek* memasukkan KH. Abdurrahman Wahid dalam daftar orang terkuat di Asia. KH. Abdurrahman Wahid menjadi pemimpin besar dan diakui karena pemikirannya dan gerakan sosial yang dibangunnya mempunyai dampak yang kuat terhadap demokrasi, keadilan, dan toleransi keagamaan di Indonesia.
4. Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan HAM di Israel, karena dianggap sebagai salah satu tokoh yang peduli dalam persoalan HAM.<sup>17</sup>
5. Ia disebut sebagai “Bapak Pluralisme” oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang Di Klenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok pada tanggal 10 Maret 2004
6. Pada tanggal 11 Agustus 2006, GadisArivia dan KH. Abdurrahman Wahid mendapat tasrif Award-AJI sebagai pejuang kebebasan Pers 2006. KH. Abdurrahman Wahid dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia.
7. KH. Abdurrahman Wahid memperoleh penghargaan dari Mebel Valor yang berkantor di Los Angeles karena KH. Abdurrahman Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas.

---

<sup>16</sup> Greg Barton, “Memahami Abdurrahman Wahid”, dalam pengantar *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. xxvi

<sup>17</sup>M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 43-

8. Ia juga memperoleh penghargaan dari universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi KH. Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Studies.<sup>18</sup>

Dari beberapa penghargaan yang diperoleh KH. Abdurrahman Wahid di atas yang diraihinya di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa kapasitas beliau sebagai seorang cendekiawan, aktivis kemanusiaan, dan tokoh pro demokrasi tidak dapat diragukan lagi.

Selain itu, KH. Abdurrahman Wahid memperoleh banyak gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Cause) dari beberapa Perguruan Tinggi ternama di berbagai negara antara lain:

1. Doktor Kehormatan bidang hukum dari Netanya University, Israel (2003)
2. Doktor Kehormatan bidang hukum dari Konkuk University, Seoul, Korea Selatan (2003)
3. Doktor Kehormatan dari Sun Moon University, Seoul, Korea Selatan (2003)
4. Doktor Kehormatan dari Soka Gakkai University, Tokyo, Jepang (2002)
5. Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Thammasat University, Bangkok, Thailand (2000)
6. Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Soeborne University, Paris, Perancis (2000)
7. Doktor Kehormatan dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2000)
8. Doktor Kehormatan dari Twente University, Belanda (2000)
9. Doktor Kehormatan dari Jawaharlal Nehru University, India (2000)<sup>19</sup>

Meskipun KH. Abdurrahman Wahid tidak mempunyai gelar kesarjanaan, namun dengan adanya gelar doktor dari beberapa negara menunjukkan bahwa Ia adalah seorang intelektual yang progresif yang kapasitas keilmuannya sangat luar biasa.

#### **D. PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID MENGENAI KONSEP *PLURALISME* AGAMA**

---

<sup>18</sup> Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 32-33

<sup>19</sup>M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 45

Masyarakat Indonesia yang plural, dengan ragam budaya, suku, etnis dan agama serta idiologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, idiologi ataupun budaya membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial dan etnis. Tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain, kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk dan konsekuensinya adalah adanya penghormatan atas pluralitas masyarakat itu.

KH. Abdurrahman Wahid mengatakan demi tegaknya *pluralisme* masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal itu masih rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar-kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi.<sup>20</sup> Namun harus ada penghargaan yang tinggi terhadap *pluralisme* itu, yaitu adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling *take and give*.<sup>21</sup>

Latar belakang faham keislaman tradisional *faham ahlussunnah wal jama'ah* serta pemikirannya yang liberal, Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran, egaliter dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan esensial lebih diutamakan dari pada legal-simbolis, Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa “embel-embel<sup>22</sup>” Islam akan tetapi ruh keislaman menyatu dalam wajah nasionalisme, lebih lanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 145

<sup>21</sup> Abdurrahman Wahid, “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia”, makalah pada seminar agama dan masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20-November 1992. Umaruddin Masdar. *Membaca Pemikiran...*, hlm. 145

<sup>22</sup> Islamisasi bukan proses Arabisasi tetapi Islamisasi lebih mengutamakan pada manifestasinya nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Selama ini proses Islamisasi belum dipahami betul oleh sebagian besar kaum muslim, hal ini terlihat misalnya: kata “saudara” tidak perlu diganti “ikhwan”, “langgar” diganti “mushola”, “sembahyang” diubah menjadi “shalat”. Hal ini terlihat bahwa proses Islamisasi baru pada visualisasi: ketidak-pedean umat Islam.

## 1. Pribumisasi Islam

Proses pertumbuhan Islam -sejak nabi Muhammad, sahabat, para ulama- tidak serta merta menolak semua tradisi pra-Islam (dalam hal ini budaya masyarakat arab pra-Islam). Tidak seluruh sistem lokal ditolak Islam, tradisi dan adat setempat yang tidak bertentangan secara diametral dengan Islam dapat diinternalisasikan menjadi ciri khas dari fenomena Islam di tempat tertentu.<sup>23</sup> Demikian juga proses pertumbuhan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari budaya dan tradisi masyarakat.

Agama dan budaya bagiakan uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Agama (Islam) bersumberkan wahyu yang bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya merupakan ciptaan manusia, oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.<sup>24</sup> Lebih lanjut Ia (KH. Abdurrahman Wahid) mengatakan:

Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya memungkinkan adanya persambungan antar berbagai kelompok atas dasar persamaan. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitroh rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai contoh redanya semangat Ulama dalam mempersoalkan rambut gondrong.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, hlm. 141

<sup>24</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), hlm. 117

<sup>25</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, hlm. 118

Pribumisasi<sup>26</sup> Islam dalam segi kehidupan bangsa merupakan suatu ide yang perlu dicermati. Selanjutnya, KH. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa pribumisasi bukan merupakan suatu upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari pribumusasi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.<sup>27</sup>

Gagasan KH. Abdurrahman Wahid ini tampak ingin memperlihatkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas *pluralisme* kebudayaan yang ada. KH. Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak “satu Islam” dalam ekspresi kebudayaan misalnya semua simbol atau identitas harus menggunakan ekspresi kebudayaan Arab. Penyeragaman yang terjadi bukan hanya akan mematikan kreativitas kebudayaan umat tetapi juga membuat Islam teralienasi dari arus utama kebudayaan nasional. Bahaya dari proses arabisasi adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri.<sup>28</sup>

“Kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau ini terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya hanyalah proses pelarian (*eskapisme*). Umat Islam terlalu menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi muslim yang baik. ...kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya menimbulkan kekeringan substitusi”.<sup>29</sup>

Bahkan KH. Abdurrahman Wahid menolak adanya pencampuradukkan kebudayaan baik oleh kalangan agama maupun

---

<sup>26</sup>Pribumisasi Islam bukanlah “*Jawanisasi*”, sebab Pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 119

<sup>27</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 119

<sup>28</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, hlm. 140

<sup>29</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 130

kalangan birokrasi karena kebudayaan sangat luas cakupannya yaitu kehidupan sosial manusia (*human social life*) itu sendiri. Birokratisasi<sup>30</sup> kebudayaan yang dilakukan akan menimbulkan kemandekan kreatifitas suatu bangsa. Kebudayaan sebuah bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan *pluralistic*, pola kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berbudaya.

Yang menjadi pertanyaan sekarang mampukah Islam tetap eksis dalam zaman yang serba modern atautkah Islam tengelam dalam mimpi atas kejayaan para pemikir terdahulu? Sebagai pemeluk agama yang baik dalam lingkup wawasan kebangsaan, menurut KH. Abdurrahman Wahid yaitu: selalu mengutamakan pencarian cara-cara yang mampu menjawab tantangan zaman dan lokalitas kehidupan tanpa meninggalkan inti ajaran agama. Selalu ada upaya untuk melakukan reaktualisasi ajaran agama dalam situasi kehidupan yang konkrit, tidak hanya dicukupkan dengan visualisasi yang abstrak belaka. Dalam bahasa lain agama berfungsi sebagai wahana pengayom tradisi bangsa, sedangkan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya.<sup>31</sup>

Benar apa yang dikatakan Greg Barton bahwa: Abdurrahman Wahid merupakan seorang tokoh yang cinta terhadap budaya Islam tradisional (dalam hal ini khazanah pemikiran Islam yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu). Namun kecintaan ini bukan berarti keterlibatan dan penerimaan segala aspek budaya tradisional karena KH. Abdurrahman Wahid sangat kritis terhadap budaya tradisional.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Kongres kebudayaan yang diprakarsasi oleh departemen pendidikan dan kebudayaan menunjukkan adanya campur tangan birokrasi pemerintah terhadap originalitas kebudayaan itu sendiri. Budaya sebagai hasil kreatifitas pemikiran manusia sebaiknya dibiarkan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 5-9

<sup>31</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 4

<sup>32</sup>Greg Barton, "Memahami Abdurrahman Wahid", dalam pengantar *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm xxxvi.



Pribumisasi Islam merupakan upaya dakwah (pola *amar ma'ruf nahi mungkar* diselaraskan dengan konsep *mabadi khoiro ummah*). Pelaksanaan kongkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi kesenjangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam.<sup>33</sup> Islam sebagai agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain diaktualisasikan sebagai inspirasi spiritual bagi tingkah laku kehidupan seorang atau kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang dibutuhkan umat Islam Indonesia adalah menyatukan “*aspirasi Islam*” menjadi “*aspirasi nasional*”.<sup>34</sup>

“Salah satu wajah ketegangan adalah upaya untuk menundukkan kebudayaan kepada agama melalui proses pemberian legitimasi. Legitimasi diberikan bukan sebagai alat penguat, tetapi sebagai alat pengerim. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan agama.”<sup>35</sup>

Islam yang merupakan agama<sup>36</sup> *rahmatan lil alamin* haruslah senantiasa memberikan kontribusi dalam menjawab masalah yang timbul akibat proses modernisasi. Mengapa demikian? Karena ajaran agama mempunyai peran yang penting dalam berbagai segi kehidupan pemeluknya. Dalam hal ini agama dijadikan tempat mencari jawaban atas problem-problem kehidupan para pemeluknya, oleh karenanya tokoh agama mempunyai peran kunci dalam merumuskan kembali hukum Islam yang lebih memperhatikan umat Islam dan non muslim

---

<sup>33</sup>Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 205-206

<sup>34</sup> Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, hlm. 207

<sup>35</sup>Abdurrahman Wahid. *Pergulatan Negara...*, hlm. 85

<sup>36</sup>Agama hanya berfungsi suplementer dan hanya menyediakan sarana bagi proses perubahan sosial, bukan agama yang membuat perubahan itu. Dunia berkembang menurut menurut pertimbangan dunia itu sendiri. Agama hanya mempengaruhi sejauh dunia itu siap dipengaruhi, tidak lebih dari itu. Begitu agama mengubah dirinya menjadi penentu, tidaklah hanya mempengaruhi tetapi menentukan, maka dia (agama) telah menjadi duniawi. Kalau hal ini yang terjadi pada gilirannya ia bisa mengundang sikap represif (agama berusaha mempertahankan dirinya). Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 167.

dengan mempertimbangkan realita (pluralitas masyarakat dan proses modernisasi serta pengaruh globalisasi).

Selama ini hukum Islam hanyalah dijadikan “pos pertahanan” untuk mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh proses sekularisasi. Kecenderungan statis ini menunjukkan ketidakmampuan hukum Islam dalam menjawab perubahan zaman yang aktual. Padahal hukum Islam masih memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam baru mampu menolak kemungkaran, kebaktilan dan kemaksiatan dan belum mampu menjadi penganjur kebaikan dalam arti yang luas.<sup>37</sup>

## 2. Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi merupakan salah satu tema besar yang perlu digaris bawahi dari perjuangan dan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Baginya konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Alasan KH. Abdurrahman Wahid mengapa Islam dikatakan agama demokrasi. Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (*amruhum syuraa bainahum*), artinya adanya tradisi bersama membahas dan mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.<sup>38</sup>

Ide demokratisasi KH. Abdurrahman Wahid muncul karena Ia melihat ada kecenderungan umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai “alternatif” bukannya sebagai “inspirasi” bagi kehidupan masyarakat. Di sinilah letak permasalahannya, Islam tidak bisa menyatakan sumbangannya lebih besar dan benar dari yang lainnya

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, hlm. 38

<sup>38</sup> Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 85

karena semua pihak sama. Adanya penghargaan terhadap pluralitas dengan menganggap mereka yang berada di luar sebagai orang mandiri.<sup>39</sup>

Meskipun banyak orang mengatakan bahwa Ia adalah seorang yang *inkonsistensi*: sering membuat manuver dan ide-ide yang membingungkan dan dianggap menyesatkan umatnya. Namun justru keinginannya menampilkan nilai-nilai Islam dalam segi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural menunjukkan Ia sangat konsisten. Hal ini terlihat dari perjuangan dan komitmennya dalam menyuarakan demokrasi, penegakan hak asasi manusia (pembelaan terhadap kaum minoritas, termasuk pembelaan terhadap perempuan) serta keadilan bagi setiap warga tanpa membedakan identitas serta latar belakang ideologi.

Lebih lanjut, dalam rangka pembelaannya terhadap demokrasi dilakukan, Ia tidak harus masuk dalam sistem tetapi di manapun dan kapanpun usaha pembelaan terhadap demokrasi dan keadilan terus dilakukan. Ia secara tegas menolak bergabung dengan ICMI<sup>40</sup> dan memelopori berdirinya forum demokrasi (FORDEM)<sup>41</sup> sekaligus menjadi ketua Fordem. Ia sosok yang tak mau menyerah dan terkesan bandel, meskipun keberadaannya di fordem mendapatkan kritikan tajam kiai senior NU dan para cendekiawan muslim. Nurcholis Majid<sup>42</sup> mengatakan:

...kalau Gus Dur tidak masuk ICMI maka Gus Dur akan kehilangan basis intelektualnya.” Gus Dur segera menjawab, “sejak kapan ICMI menjadi basis intelektual saya, basis intelektual saya itu di pesantren, kiai pondokan, sekali lagi bukan ICMI.”

---

<sup>39</sup>Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, hlm. 199

<sup>40</sup>ICMI yang merupakan organisasi buatan pemerintah yang kebijakannya banyak dimonopoli oleh pemerintahan Soeharto ketika itu.

<sup>41</sup>Fordem sebagian besar beranggotakan orang-orang non-muslim, sehingga kedekatan Gus Dur dengan orang non-muslim banyak dicurigai oleh tokoh Islam sendiri. Ia dikatakan agen zionis, membela non muslim dan dianggap menghancurkan Islam. Jawaban yang dikemukakan Gus Dur menjawab tuduhan itu sangat sederhana: saya justru berpegang pada al Qur'an dan Hadits Nabi bahwa, al Qur'an menekankan pentingnya perlindungan pada kelompok-kelompok minoritas, termasuk orang Kristen dan Konghucu. Lihat Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, hlm. 28

<sup>42</sup>Listiono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Ar Ruuz, 2004), hlm. 72.

Pembelaan terhadap minoritas mendapatkan perhatian yang serius dari KH. Abdurrahman Wahid. Undang-undang menjamin akan perlakuan yang sama terhadap warga masyarakat untuk: berpendapat, keamanan, memilih agama dan pindah agama dan seterusnya. Muslim yang mayoritas harus dapat melindungi mereka yang minoritas.

“...merupakan pengingkaran hakekat demokrasi yang ingin kita tegakkan di negeri ini, karena akan menjadikan mereka yang tidak memeluk agama mayoritas menjadi warga negara kelas dua. Dalam keadaan demikian, persamaan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang tidak tercapai.”<sup>43</sup>

Dalam konteks ke-Indonesi-an yang pluralistik hendaknya Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memposisikan syari’ah berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam dalam demokrasi bisa dicapai bila dari Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan dan *rule of law*, karena dalam satu aspeknya adalah merupakan agama hukum. Pemikiran demokrasi KH. Abdurrahman Wahid menunjukkan ia telah menerima konsep demokrasi liberal atau parlementer dan secara tegas menolak pemikiran atau “kedaulatan Tuhan” atau pemikiran yang berusaha mengawinkan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, seperti yang dirumuskan oleh Dhiya’ ad-Din Rais.<sup>44</sup>

“Saya bersedia memakai yang manapun asal benar dan cocok dengan hati nurani. Saya tidak memedulikan kutipan dari injil, Bhagawad Gita kalau benar kita terima. Dalam masalah bangsa ayat-ayat al Qur’an kita pakai secara fungsional bukannya untuk diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi, soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis tetapi sudah pemikiran.”<sup>45</sup>

Kedaulatan ada di tangan rakyat, ini merupakan kata kunci dari “demokrasi”. Rakyat yang menentukan arah dan haluan negara menuju

---

<sup>43</sup>Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 111.

<sup>44</sup>Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, hlm.147

<sup>45</sup>Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, hlm. 202

masa depan dalam kehidupan yang adil dan beradab demi kesejahteraan bangsa dan negara. Mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. Yang jelas rakyat menginginkan keadilan, kesejahteraan hidup lahir maupun batin, baik secara material maupun spiritual.<sup>46</sup>

### **3. Prinsip Humanis dalam Pluralitas Masyarakat**

Dalam proses demokratisasi ada sesuatu keharusan, yang tak boleh dilupakan dan diabaikan yaitu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan ini tak dapat diabaikan karena hakekat dari demokrasi adalah menempatkan manusia sebagai subjek demokrasi itu sendiri.

“...dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kita kesediaan bersama untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah.”<sup>47</sup>

Pandangan KH. Abdurrahman Wahid tentang kemanusiaan ini muncul karena masih adanya konflik berkepanjangan yang terus terjadi hingga sekarang baik atas nama suku, ras, golongan maupun yang mengatasnamakan agama di berbagai pelosok di Indonesia. Konflik yang berkepanjangan ini menunjukkan belum adanya penghargaan terhadap kemanusiaan dan mudahnya orang main hakim sendiri. Dalam hal ini tokoh agama, birokrat, pendidik, tokoh masyarakat berperan terhadap penanaman nilai-nilai agama yang berkaitan dengan moralitas.

Agama samawi yang terakhir (Islam) menurut KH. Abdurrahman Wahid memuat lima jaminan kemanusiaan. Jaminan itu antara lain: keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, jaminan atas keyakinan agama masing-masing, keselamatan keluarga dan keturunan, perlindungan harta benda dan

---

<sup>46</sup>Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, hlm. 115

<sup>47</sup>Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 190

milik pribadi.<sup>48</sup> Dari kelima jaminan dasar Islam terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa Islam memperlakukan warga masyarakat tanpa membedakan agama.

#### 4. Prinsip Keadilan dan Egaliter

Demokrasi dikatakan berhasil jikalau warga masyarakat mendapatkan keadilan. Demokrasi terasa berkeadilan apabila ada kesetaraan (egalitarianisme) warga masyarakat baik di depan undang-undang, hukum maupun dalam lembaga birokrasi dengan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi gender, warna kulit, pribumi-keturunan, etnis, idiologi, dan agama.

“Jika dikaitkan dengan keadilan, demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau Islam menopang demokrasi, maka Islam juga harus menopang keadilan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, “*wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan*”. Perintah ini sangat jelas, yakni perlunya ditegakkan keadilan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaidah fiqh: *langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu*. Karena orientasinya adalah kesejahteraan rakyat, maka keadilan sangat dipentingkan. Orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demokratis atau tidaknya kehidupan suatu masyarakat”.<sup>49</sup>

Dari uraian di atas dapat tarik benang biru bahwa perbedaan agama, budaya, etnis harus dipahami dengan sikap yang bijak dan arif dari semua pihak tanpa mengunggulkan kelompok sendiri sembari merendahkan kelompok lain. Tiap kelompok masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam membangun Indonesia. Dengan rasa solidaritas, keterbukaan, toleransi dan dialog kita membangun Indonesia yang berbudaya dan beradab, aman dan damai.

---

<sup>48</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 180

<sup>49</sup>Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, hlm. 86

## **E. Implikasi *Pluralisme* Agama KH. Abdurrahman Wahid Dalam Pendidikan Islam**

*Pluralisme* merupakan sikap saling mengerti, memahami dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan. Dalam *pluralisme* hakikat pendidikan Islam sebagai *transfer of knowledge* dan *transfer of value*, yakni seorang mencari pendidikan mampu memperoleh pengetahuan dan mendidik dalam berperilaku atau membawa anak untuk berperilaku ke arah dewasa.

Sebagai seorang yang memiliki pemahaman terhadap pemikiran Islam klasik (dunia pesantren) serta dunia Barat (liberal) ditambah dengan pengetahuan dan pengalamannya di dunia pendidikan yang cukup lama, maka kita tidak dapat memungkiri bahwa KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki berbagai macam ide progresif untuk selalu memajukan bangsa Indonesia dengan berbekal pada rasa kecintaan beliau pada bangsa Indonesia. Salah satu ide beliau yang selalu di dengungkan adalah *pluralisme*. Dari ide-ide *pluralisme* agama diatas penulis akan mencoba mengimplikasikan ke dalam pendidikan Islam.

### **1. Pribumisasi Islam**

Pribumisasi Islam adalah akar untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, dengan tidak menjadikan agama sebagai subordinat dari budaya begitu juga dengan sebaliknya, melainkan bagaimana agama khususnya Islam dapat diinternalisasikan dalam kebudayaan dengan tidak saling mensubordinatkan. Pribumisasi dipakai KH. Abdurrahman Wahid adalah bagaimana mempertimbangkan kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri.

Dasar-dasar yang diletakkan beliau dalam pribumisasi Islam ini secara tidak langsung telah mencerminkan tujuan pendidikan Islam. Dengan tidak membuat suatu polarisasi antara agama dengan budaya, sinkronisasi kepentingan nasional dengan kepentingan Islam serta

tidak membuat Arabisasi di masyarakat Indonesia akan menunjukkan bahwa Islam benar-benar agama yang *rahmatan lil-alamin* dalam hubungannya kepada Allah (*hablum minallah*) sebagai Tuhan Sang Pencipta, dengan sesama manusia (*hablum minan nas*), dan kepada lingkungan di sekitarnya (*hablum minal alam*).

Sinkronisasi kepentingan tersebut pada dasarnya juga menjadi tujuan dari pada pendidikan Islam, dalam artian bahwa tujuan pendidikan Islam yang membentuk seorang individu sempurna dengan intelegensi tinggi serta menjunjung tinggi etika dan moralitas.

## 2. Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Tujuan akhir pendidikan adalah perubahan perilaku dan sikap serta kualitas seseorang, maka pengajaran harus berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak sekedar memberi informasi atau pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan mendorongnya dapat mengambil keputusan untuk berubah. Di samping itu bertujuan untuk memperteguh keyakinan pada agamanya, juga harus diorientasikan untuk menanamkan empati, simpati, solidaritas, terhadap sesama.

Dengan melihat tujuan akhir pendidikan sebagaimana diatas sebenarnya gagasan KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi menunjukkan nilai-nilai tujuan akhir tersebut. Demokrasi yang dibawa KH. Abdurrahman Wahid yang menekankan pada terciptanya keharmonisan bermasyarakat dengan saling menghargai pendapat orang lain, memunculkan rasa empati dan simpati serta solidaritas baik antar sesama muslim ataupun dengan non-muslim, sehingga pada saatnya nanti akan tercipta suatu kultur demokratis dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Tujuan pendidikan Islam yang membentuk karakter individu sempurna dapat tercapai dengan adanya lingkungan yang demokratis, karakter individu yang memiliki nalar kritis, inovatif, serta cepat dan tepat dalam menghadapi permasalahan tidak akan dapat tercapai jika dalam lingkungan sekitarnya masih tidak menghargai prinsip



demokratis. Untuk itulah prinsip demokratis selalu KH. Abdurrahman Wahid dengungkan demi tercapainya cita-cita pembentukan individu sempurna dengan daya intelektual tinggi yang tidak meninggalkan etika dan moralitas